## BAB I PENDAHULUAN

* 1. **MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

## Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk menya

jikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap

selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

* + - 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

* + - 1. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

* + - 1. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kabupaten Cilacap menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan :

* + - 1. Menyedikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
      2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
      3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
      4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
      5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
      6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
      7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, dan beban. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

* + 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
    16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.

## SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

## Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan keuangan

## Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

## Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

## Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas

## Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VII Penutup

**BAB II**

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

* 1. **EKONOMI MAKRO**

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

## KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

* + 1. **Dasar Hukum**

Program / Kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan:

* + - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
      2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
      3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
      4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.

## Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| **1.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan  ASN | **14.383.097.609,00** |
| **2.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**  **Daerah** |  | **27.530.000,00** |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah | 12.530.000,00 |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000,00 |
| **3.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | **12.528.866,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta  Atribut Kelengkapannya | 0,00 |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12.528.866,00 |
| **4.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | **804.684.300,00** |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | 64.513.800,00 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 328.152.500,00 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000,00 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD | 352.018.000,00 |
| **5.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **27.000.000,00** |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin  Lainnya | 27.000.000,00 |
| **6.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**  **Daerah** |  | **3.313.629.200,00** |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan Listrik | 360.000.000,00 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  Kantor | 2,953,629,200 |
| **7.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  | **1.108.571.950,00** |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas  Operasional atau Lapangan | 695.056.650,00 |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  Lainnya | 266.840.000,00 |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  Kantor dan Bangunan Lainnya | 146.675.300,00 |
| **8.** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi**  **Bangunan Gedung** |  | **22.233.794.000,00** |
|  |  | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi  SIMBG | 300.000.000,00 |
|  |  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 21,933,794,000 |
| **9.** | **Penyelenggaraan Jalan** |  | **195.464.521.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
|  | **Kabupaten/Kota** |  |  |
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan  Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 225.000.000,00 |
|  |  | Rekonstruksi Jalan | 160.738.524.000,00 |
|  |  | Rehabilitasi Jalan | 3.855.000.000,00 |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan | 17.449.322.000,00 |
|  |  | Pembangunan Jembatan | 13.196.675.000,00 |
| **10.** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)**  **Kabupaten/Kota** |  | **400.000.000,00** |
|  |  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi,  Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 0,00 |
|  |  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan  Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 |
|  |  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan  Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 100.000.000,00 |
| **11.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**  **Kabupaten/Kota** |  | **200.000.000,00** |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi  dan Pembangunan Daerah | 200.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | **237.975.356.925,00** |

## BAB III

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

## IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut disajikan realisasi / capaian program / kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi**  **Anggaran (Rp)** | **Pencapaian**  **Kinerja (%)((4)/(3))** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **14.383.097.609,00** | **13.798.580.522,00** | **95,94** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.383.097.609,00 | 13.798.580.522,00 | 95,94 |
| **2.** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **27.530.000,00** | **27.530.000,00** | **100,00** |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 | 100,00 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| **3.** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12.528.866,00** | **7.538.866,00** | **60,17** |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta  Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12.528.866,00 | 7.538.866,00 | 60,17 |
| **4.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **804.684.300,00** | **803.046.999,00** | **99,80** |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor | 64.513.800,00 | 64.513.800,00 | 100,00 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 328.152.500,00 | 327.144.000,00 | 99,69 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan | 60.000.000,00 | 59.432.050,00 | 99,05 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD | 352.018.000,00 | 351.957.149,00 | 99,98 |
| **5.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **27.000.000,00** | **27.000.000,00** | **100,00** |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 100,00 |
| **6.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.313.629.200,00** | **2.972.966.858** | **89.72** |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  Daya Air dan Listrik | 360.000.000,00 | 267.887.147,00 | 74,41 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  Kantor | 2,953,629,200 | 2,705,079,711.00 | 91.58 |
| **7.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.108.571.950,00** | **857.371.012,00** | **77,34** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau  Lapangan | 695.056.650,00 | 443.855.712,00 | 63,86 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 266.840.000,00 | 266.840.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran (Rp)** | **Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))** |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 146.675.300,00 | 146.675.300,00 | 100,00 |
| **8.** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi**  **Bangunan Gedung** | **22.233.794.000,00** | **22.044.736.400,00** | **99.15** |
|  | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi  SIMBG | 300.000.000,00 | 289.410.000,00 | 96,47 |
|  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan  Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 21,933,794,000 | 21,755,326,400.00 | 99,19 |
| **9.** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **195.464.521.000,00** | **194.025.585.340,00** | **99,26** |
|  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis  Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 225.000.000,00 | 219.535.000,00 | 97,57 |
|  | Rekonstruksi Jalan | 160.738.524.000,00 | 159.405.104.000,00 | 99,17 |
|  | Rehabilitasi Jalan | 3.855.000.000,00 | 3.841.073.000,00 | 99,64 |
|  | Pemeliharaan Rutin Jalan | 17.449.322.000,00 | 17.377.399.840,00 | 99,59 |
|  | Pembangunan Jembatan | 13.196.675.000,00 | 13.182.473.500,00 | 99,89 |
| **10.** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **400.000.000,00** | **340.055.000,00** | **85,01** |
|  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan  Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan  Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 241.755.000,00 | 80,59 |
|  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan  Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 100.000.000,00 | 98.300.000,00 | 98,30 |
| **11.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi**  **Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **200.000.000,00** | **197.400.000,00** | **98,70** |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi  Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 200.000.000,00 | 197.400.000,00 | 98,70 |
| **Jumlah** | | **237.975.356.925,00** | **235.101.810.997,00** | **98.79** |

## HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

* + 1. **PENDAPATAN**

Pada tahun 2021 terdapat pendapatan yang realisasi anggarannya kurang antara lain :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendapatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran (Rp)** | **(%) ((4) / (3))** | **Penjelasan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** |
| 1. | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 650.000.000,00 | 492.633.200,00 | 75,79 | -Terlalu tingginya target PAD Laboratorium tahun 2021 kurang dilandasi kondisi real APBD dari sektor konstruksi/fisik  - Belum disahkannya revisi Perda Kabupaten Cilacap No.17 Tahun 2018 dimana dalam revisi tersebut ada kenaikan tarif retribusi Laboratorium Pekerjaan Umum. |
| 2. | Retribusi Pemakaian Kendaaraan Bermotor | 1.425.000.000,00 | 261.760.800,00 | 18,37 | * Alat berat yang dapat beroperasi hanya 16 unit * Salah satu alat untuk mengejar target adalah unit excavator, yang baru dapat beroperasi secara normal mulai bulan november dan desember 2021 * Alat berat excavator tidak dapat masuk dalam penanganan kegiatan APBD tahun 2021 * Peralihan konstruksi pengaspalan jalan menjadi rigid, sehingga penggunaan alat berat mesin gilas tidak dapat maksimal penggunaannya. |

## BELANJA

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja sehingga penyerapannya kurang antara lain :

* + - 1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Anggaran sebesar Rp 12.528.866,00 terealisasi sebesar Rp 7.538.866,00 atau sebesar 60,17 %, dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga banyak dilakukan melalui zoom meeting.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran sebesar Rp 360.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 267.887.147,00 atau sebesar 74,41 %, dikarenakan adanya WFH sehingga mengurangi biaya operasional untuk jasa komunikasi, air dan listrik.

* + - 1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Anggaran sebesar Rp 695.056.650,00 terealisasi sebesar Rp 443.855.712,00 atau sebesar 63,86 %, dikarenakan adanya pandemi covid-19 perjalanan dinas keluar kota terbatas sehingga pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas pun berkurang.

Tabel Daftar Kegiatan yang realisasi / penyerapan anggarannya kurang dari 75 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran (Rp)** | **Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  |  |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12.528.866,00 | 7.538.866,00 | 60,17 |
| 2. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  Daya Air dan Listrik | 360.000.000,00 | 267.887.147,00 | 74,41 |
| 3. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**  **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan  Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 695.056.650,00 | 443.855.712,00 | 63,86 |
| **Jumlah** | | **1.067.585.516,00** | **719.281.725,00** | **67,37** |

## ENTITAS AKUNTANSI

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap

selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

## BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 217 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

## BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

## Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

* + - * 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
        2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
        3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  < 1 tahun | Kurang Lancar  1 s.d. 2 tahun | Diragukan  >2 s.d. 5  tahun | Macet  >5 tahun |
| Piutang Pajak Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  0 s.d. 1 bulan | Kurang Lancar  >1 s.d. 3  bulan | Diragukan  >3 s.d. 12  bulan | Macet  >12  bulan |
| Piutang Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Lancar  0 s.d. 1 bulan | Kurang Lancar  >1 s.d. 3  bulan | Diragukan  >3 s.d. 12  bulan | Macet  >12  bulan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

* + - * 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
        2. Persediaan dicatat sebesar:

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

* + - * 1. Persediaan dinilai dengan menggunakan **Metode Masuk Pertama Keluar Pertama** yang dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2020.
        2. Sistem pencatatan persediaan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

**Metode Perpetual**, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan

untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

**Metode Periodik**, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui

dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

## Aset Tetap

* + - * 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
        2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

Jalan , Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

* + - * 1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

* + - * 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah Harga**  **Lusin/Set/Satuan** | |
| 1 | Tanah | Rp. | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : |  | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | Rp. | 300.000,00 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | Rp. | 300.000,00 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp. | 300.000,00 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | Rp. | 300.000,00 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga |  | |
|  | Alat-alat Kantor | Rp. | 300.000,00 |
|  | Alat-alat Rumah Tangga | Rp. | 300.000,00 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | Rp. | 300.000,00 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | Rp. | 300.000,00 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | Rp. | 300.000,00 |
| 2.9 | Alat Keamanan | Rp. | 300.000,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: |  | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | Rp. 10.000.000,00 | |
| 3.2 | Bangunan Monumen | Rp. 10.000.000,00 | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: |  | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | Rp. | 0,00 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | Rp. | 0,00 |
| 4.3 | Instalasi | Rp. | 0,00 |
| 4.4 | Jaringan | Rp. | 0,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: |  | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | Rp. | 0,00 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan  /Olahraga | Rp. | 0,00 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan |  | |
|  | Hewan | Rp. | 300.000,00 |
|  | Ternak | Rp. | 300.000,00 |
|  | Tumbuhan Pohon | Rp. | 300.000,00 |
|  | Tumbuhan Tanaman Hias | Rp. | 300.000,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp. | 0,00 |

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

1. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
2. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehinggga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (installation cost);
4. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
5. Biaya konstruksi;
6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Bab X Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap)
2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai

output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

1. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
2. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.
   * + - 1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
         2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.
       1. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

## Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

1. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

1. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

1. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

1. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

1. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

* + - * 1. **Aset Tak Berwujud (ATB)**

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Perolehan ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Perolehan ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (*neto*) bagi entitas.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas seperti goodwill tidak boleh diamortisasi.

# Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain- lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## Pengukuran Pendapatan-LRA

* + - 1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara

penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

* + - 1. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
      2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
      3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
      4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## Pengukuran Belanja

* + - 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
      2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
      3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
      4. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

## Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

## Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

## Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak

Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
3. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
4. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Asli Daerah-LO
     1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

* + - 1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

* + - 1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official *assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan

telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

* + 1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

* + 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

* + 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO
       1. Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

* + - 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

* + - 1. Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa

diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

* + 1. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

* + 1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD *(realized).*

* + 1. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

## Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

1. Beban Barang
   1. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

* 1. Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

1. Beban Hibah Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota

perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

1. Beban Bantuan Sosial Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen

keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

1. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban

Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penyusutan per periode | = | Harga Perolehan |
| Masa manfaat (dalam bulan) |

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 |  |  | ASET TETAP |  |
| 1 | 3 | 2 |  | Peralatan dan Mesin |  |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat –alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga / Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Amunisi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 34 | Senjata Sinar | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 35 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
| 1 | 3 | 3 |  | Gedung dan Bangunan |  |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen / Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol / Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu – Rambu | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara | 50 |
| 1 | 3 | 4 |  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan |  |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodefikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat**  **(Tahun)** |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih /Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/ Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

1. Beban Penyisihan Piutang Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Beban Transfer Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

1. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

## PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

* + 1. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

* + 1. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.

## BAB V

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

## 1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

* 1. **PENDAPATAN - LRA**

Realisasi Pendapatan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Daerah** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Retribusi Daerah | 2.075.000.000,00 | 754.394.000,00 | 36,36 | 1.332.551.800,00 | (1.320.606.000,00) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **2.075.000.000,00** | **754.394.000,00** | **36,36** | **1.332.551.800,00** | **(1.320.606.000,00)** |

Realisasi Pendapatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TA 2021 sebesar Rp 754.394.000,00 atau 36,36 % dari anggarannya sebesar Rp 2.075.000.000,00 atau 56,61 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 1.332.551.800,00.

Pendapatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG diatur dengan Perda NO.17 TAHUN 2018. Untuk tahun 2021 pendapatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG pada pemakaian retribusi laboratorium tidak tercapai karena terlalu tingginya target PAD Laboratorium tahun 2021 dan belum disahkannya revisi Perda Kabupaten Cilacap No.17 Tahun 2018 dimana dalam revisi tersebut ada kenaikan tarif retribusi Laboratorium Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk pemakaian retribusi kendaraan bermotor tidak tercapai karena alat berat (eksavator) yang dapat beroperasi hanya 16 unit dan baru beroperasi secara normal mulai bulan november dan desember 2021. Dengan adanya peralihan konstruksi pengaspalan jalan menjadi rigid juga menyebabkan penggunaan alat berat mesin gilas tidak dapat maksimal penggunaannya.

## BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi (BO), dan Belanja Modal (BM). Anggaran dan realisasi belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Daerah** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi (BO) | 50.932.885.925,00 | 49.513.843.097,00 | 97,21 | 27.022.752.532,00 | (1.419.042.828,00) |
| 2 | Belanja Modal (BM) | 187.042.471.000,00 | 185.587.967.900,00 | 99,22 | 140.181.757.316,00 | (1.454.503.100,00) |
| **Jumlah** | | **237.975.356.925,00** | **235.101.810.997,00** | **98,79** | **167.204.509.848,00** | **(2.873.545.928,00)** |

Jumlah Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp 235.101.810.997,00 atau 98,79 % dari anggaran sebesar Rp 237.975.356.925,00 dan 140,61 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 167.204.509.848,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## V.1.b.1) Belanja Operasi (BO)

Belanja Operasi (BO) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG Kabupaten Cilacap TA 2021 dan TA 2020 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah, yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Operasi (BO)** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Pegawai | 15.041.057.609,00 | 14.242.920.522,00 | 94,69 | 13.041.818.886,00 | (798.137.087,00) |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.008.601.316,00 | 22.478.701.575,00 | 97,70 | 13.980.933.646,00 | (529.899.741,00) |
| 3 | Belanja Hibah | 12.883.227.000,00 | 12.792.221.000,00 | 99,29 | 0,00 | (91.006.000,00) |
| **Jumlah** | | **50.932.885.925,00** | **49.513.843.097,00** | **97,21** | **27.022.752.532,00** | **(1.419.042.828,00)** |

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp 49.513.843.097,00 atau 97,21

% dari anggaran sebesar Rp 50.932.885.925,00 dan 183,23 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 27.022.752.532,00.

## V.1.b.1)a) Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) realisasi seluruhnya dalam TA 2021 sebesar Rp14.242.920.522,00 atau 94,69 % dari anggarannya sebesar Rp 15.041.057.609,00 atau 109,21 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 13.041.818.886,00.

Realisasi belanja pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Pegawai:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja Gaji dan tunjangan ASN | 8.783.701.609,00 | 8.689.812.057,00 | 98,93 | 8.550.574.406,00 | (93.889.552,00) |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 5.592.696.000,00 | 5.108.768.465,00 | 91,35 | 4.491.244.480,00 | (483.927.535,00) |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 664.660.000,00 | 444.340.000,00 | 66,85 | 0,00 | (220.320.000,00) |
| **Jumlah** | | **15.041.057.609,00** | **14.242.920.522,00** | **94,69** | **13.041.818.886,00** | **(798.137.087,00)** |

## V.1.b.1)b) Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2021 sebesar Rp 22.478.701.575,00 atau 97,70 % dari anggarannya sebesar Rp 23.008.601.316,00 atau 160,78 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 13.980.933.646,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Barang dan Jasa** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja barang pakai habis | 1.159.393.345,00 | 1.121.920.450,00 | 96,77 | 696.275.300,00 | (37.472.895,00) |
| 2 | Belanja jasa kantor | 2.652.819.345,00 | 2.520.363.147,00 | 95,01 | 3.511.667.813,00 | (132.456.198,00) |
| 3 | Belanja iuran jaminan/asuransi | 165.619.200,00 | 147.339.711,00 | 88,96 | 122.731.027,00 | (18.279.489,00) |
| 4 | Belanja sewa gedung dan bangunan | 6.500.000,00 | 3.900.000,00 | 60,00 | 2.600.000,00 | (2.600.000,00) |
| 5 | Belanja jasa konsultasi konstruksi | 383.090.000,00 | 324.345.000,00 | 84,67 | 0,00 | (58.745.000,00) |
| 6 | Belanja jasa konsultasi non konstruksi | 80.370.000,00 | 79.890.000,00 | 99,40 | 0,00 | (480.000,00) |
| 7 | Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan | 142.019.666,00 | 137.029.666,00 | 96,49 | 62.955.486,00 | (4.990.000,00) |
| 8 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 586.564.760,00 | 383.733.612,00 | 65,42 | 827.700.108,00 | (202.831.148,00) |
| 9 | Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi | 17.449.322.000,00 | 17.377.399.840,00 | 99,59 | 6.938.495.896,00 | (71.922.160,00) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Barang dan Jasa** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 10 | Belanja perjalanan dinas dalam negeri | 382.903.000,00 | 382.780.149,00 | 99,97 | 534.893.516,00 | (122.851,00) |
| 11 | Belanja Barang untuk dijual / diserahkan kepada pihak ketiga/lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.614.500,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **23.008.601.316,00** | **22.478.701.575,00** | **97,70** | **13.980.933.646,00** | **(529.899.741,00)** |

## V.1.b.1)c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 sebesar Rp 12.792.221.000,00 atau 99,29 % dari anggarannya sebesar Rp 12.883.227.000,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Hibah:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik/(Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat | 12.883.227.000,00 | 12.792.221.000,00 | 99,29 | 0,00 | (91.006.000,00) |
| **Jumlah** | | **12.883.227.000,00** | **12.792.221.000,00** | **99,29** | **0,00** | **(91.006.000,00)** |

## V.1.b.1) Belanja Modal (BM)

Realisasi Belanja Modal (BM) dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2021 dan TA 2020, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Modal (BM):** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | BM-Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BM-Peralatan & Mesin | 32.590.000,00 | 32.500.000,00 | 99,72 | 0,00 | (90.000,00) |
| 3 | BM-Gedung & Bangunan | 9.050.567.000,00 | 8.963.105.400,00 | 99,03 | 5.595.984.214,00 | (87.461.600,00) |
| 4 | BM-Jalan, Jaringan & Irigasi | 177.959.314.000,00 | 176.592.362.500,00 | 99,23 | 134.585.773.102,00 | (1.366.951.500,00) |
| **Jumlah** | | **187.042.471.000,00** | **185.587.967.900,00** | **99,22** | **140.181.757.316,00** | **(1.454.503.100,00)** |

Realisasi Belanja Modal (BM) pada TA 2021 sebesar Rp 185.587.967.900,00 atau 99,22% dari anggarannya sebesar Rp 187.042.471.000,00 atau 132,39 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 140.181.757.316,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

## V.1.b.1)a) BM-Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2021 sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,00.

## V.1.b.1)b) BM - Peralatan dan Mesin

Realisasi BM - Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sebesar Rp 32.500.000,00 atau 99,72 % dari anggarannya sebesar Rp 32.590.000,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Peralatan dan Mesin:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 5.590.000,00 | 5.500.000,00 | 98,39 | 0,00 | (90.000,00) |
| 2 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 13.150.000,00 | 13.150.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Peralatan dan Mesin:** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 3 | Alat –alat studio | 13.850.000,00 | 13.850.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **32.590.000,00** | **32.500.000,00** | **99,72** | **0,00** | **(90.000,00)** |

## V.1.b.1)c) BM-Gedung dan Bangunan

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2021 sebesar Rp 8.963.105.400,00 atau 99,03 % dari anggarannya sebesar Rp 9.050.567.000,00 atau 160,17 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 5.595.984.214,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Gedung dan Bangunan** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | Pengadaan bangunan gedung kantor | 3.258.608.000,00 | 3.207.471.375,00 | 98,43 | 2.833.311.880,00 | (51.136.625,00) |
| 2 | Pengadaan bangunan Kesehatan | 902.020.000,00 | 898.016.000,00 | 99,56 | 2.447.325.364,00 | (4.004.000,00) |
| 3 | Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan | 2.889.939.000,00 | 2.882.995.825,00 | 99,76 | 78.824.120,00 | (6.943.175,00) |
| 4 | Pengadaan bangunan gedung tempat olahraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.110.000,00 | 0,00 |
| 5 | Pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara | 2.000.000.000,00 | 1.974.622.200,00 | 98,73 | 41.412.850,00 | (25.377.800,00) |
| **Jumlah** | | **9.050.567.000,00** | **8.963.105.400,00** | **99,03** | **5.595.984.214,00** | **(87.461.600,00)** |

## V.1.b.1)d) BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi pada TA 2021 sebesar Rp 176.592.362.500,00 atau 99,23 % dari anggarannya sebesar Rp 177.959.314.000,00 atau 131,21 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 134.585.773.102,00. dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM-Jalan, Jaringan & Irigasi** | | **TA 2021** | | | **TA 2020** | **Naik (Turun) (Rp)** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| 1 | BM-Jalan Kabupaten | 164.762.639.000,00 | 163.409.889.000,00 | 99,18 | 122.351.740.102,00 | (1.352.750.000,00) |
| 2 | BM-Jembatan pada Jalan Kabupaten | 13.196.675.000,00 | 13.182.473.500,00 | 99,89 | 12.234.033.000,00 | (14.201.500,00) |
| **Jumlah** | | **177.959.314.000,00** | **176.592.362.500,00** | **99,23** | **134.585.773.102,00** | **(1.366.951.500,00)** |

## V.1.b.1)e) BM-Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,00.

## V.1.b.1)f) BM-Aset Tak Berwujud

Realisasi BM-Aset Tak Berwujud TA 2021 sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp 0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,00.

## V.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

* + 1. **ASET LANCAR**

## Kas di Bendahara Penerimaan

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

## Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00

## Piutang

Rekening ini menggambarkan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

## Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 masing- masing sebesar (Rp 0,00) dan (Rp 0,00).

## Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing- masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran premi asuransi yang dimiliki DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap yang masih memiliki masa manfaat kedepan (setelah tanggal neraca).

## Persediaan

Saldo rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember**  **2020 (Rp)** |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 1.067.550,00 | 186.900,00 |
| 2 | Persediaan Alat Listrik dan Elektronik | 159.200,00 | 195.500,00 |
| 3 | Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 0,00 | 294.700,00 |
| **JUMLAH** | | **1.226.750,00** | **677.100,00** |

Nilai persediaan yang disajikan tersebut belum termasuk persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang.

Berdasarkan analisis horizontal Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Belanja barang dan jasa – persediaan (LRA) | 690.146.450,00 |
| Persediaan awal tahun | 677.100,00 |
| Persediaan akhir tahun | 1.226.750,00 |
| **Jumlah Beban persediaan (LO) sesuai rumus diatas** | **689.596.800,00** |
| **Beban Persediaan (LO)** | **689.596.800,00** |
| **Selisih** | **0,00** |
| **Penjelasan Selisih** |  |

## ASET TETAP

Nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2021 diperoleh dari nilai Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*) ditambah dengan mutasi selama Tahun 2021 berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap.

Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Komposisi rekening Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aset Tetap** | **Per 31 Des. 2021 (Rp)** | **Per 31 Des. 2020 (Rp)** |
| 1 | Tanah | 145.069.301.723,88 | 145.069.301.723,88 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 32.744.014.529,60 | 32.376.113.914,60 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 22.210.736.139,00 | 21.885.487.139,00 |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.560.957.840.493,05 | 1.381.447.419.993,05 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 121.290.888,00 | 121.290.888,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 10.692.976.399,00 | 14.176.291.399,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (760.472.473.533,58) | (760.472.473.533,58) |
| **JUMLAH** | | **1.011.323.686.638,95** | **834.603.431.523,95** |

Mutasi Aset Tetap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **NAMA REKENING** | **SALDO AWAL** | **PENAMBAHAN** | **PENGURANGAN** | **SALDO AKHIR** |
| 1.3.1 | Tanah | 145.069.301.723,88 | 0,00 | 0,00 | 145.069.301.723,88 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 32.376.113.914,60 | 427.900.615,00 | 60.000.000,00 | 32.744.014.529,60 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 21.885.487.139,00 | 8.963.105.400,00 | 8.637.856.400,00 | 22.210.736.139,00 |
| 1.3.4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.381.447.419.993,05 | 179.510.420.500,00 | 0,00 | 1.560.957.840.493,05 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 121.290.888,00 | 0,00 | 0,00 | 121.290.888,00 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 14.176.291.399,00 | 0,00 | 3.483.315.000,00 | 10.692.976.399,00 |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | (760.472.473.533,58) | (0,00) | (0,00) | (760.472.473.533,58) |
|  | **TOTAL ASET TETAP** | **834.603.431.523,95** | **188.901.426.515,00** | **12.181.171.400,00** | **1.011.323.686.638,95** |

## Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 145.069.301.723,88 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 145.069.301.723,88. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **145.069.301.723,88** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **0,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **0,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **145.069.301.723,88** |

## Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 32.744.014.529,60 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.376.113.914,60. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp 367.900.615,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp 427.900.615,00 dan pengurangan sebesar Rp 60.000.000,00. Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **32.376.113.914,60** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 32.500.000,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 120.000.000,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 275.400.615,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **427.900.615,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | (60.000.000,00) |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **(60.000.000,00)** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **32.744.014.529,60** |

## Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 22.210.736.139,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.885.487.139,00. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp 325.249.000,00. Penurunan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp 8.963.105.400,00 dan pengurangan sebesar Rp 8.637.856.400,00. Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **21.885.487.139,00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 8.963.105.400,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **8.963.105.400,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | (229.004.700,00) |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | (8.408.851.700,00) |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **( 8.637.856.400,00)** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **22.210.736.139,00** |

## Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.560.957.840.493,05 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.381.447.419.993,05. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp 179.510.420.500,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp 179.510.420.500,00 dan pengurangan sebesar Rp 0,00. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **1.381.447.419.993,05** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 176.592.362.500,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 2.918.058.000,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **179.510.420.500,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **0,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **1.560.957.840.493,05** |

## Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 121.290.888,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 121.290.888,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar Rp 0,00. Aset tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| **1** | **Saldo per 31 Desember 2020** | **121.290.888,00** |
|  | MUTASI PENAMBAHAN |  |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| **2** | **TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)** | **0,00** |
|  | MUTASI PENGURANGAN |  |
| h | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| i | Penghapusan | 0,00 |
| j | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| k | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| l | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| **3** | **TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)** | **0,00** |
| **4** | **Saldo per 31 Desember 2021** | **121.290.888,00** |

## Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.692.976.399,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.176.291.399,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Per 31 Des. 2021**  **(Rp)** | **Per 31 Des. 2020**  **(Rp)** |
| - Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 49.835.000,00 | 49.835.000,00 |
| - Bangunan Gedung Kantor | 943.347.350,00 | 776.689.380,00 |
| - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 0,00 | 78.824.120,00 |
| - Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 0,00 | 46.421.000,00 |
| - Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 0,00 | 41.412.850,00 |
| - Jembatan Kabupaten/Kota | 0,00 | 13.183.109.049,00 |
| - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 9.699.794.049,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **10.692.976.399,00** | **14.176.291.399,00** |

## Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp 760.472.473.533,58) dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 760.472.473.533,58) dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA REKENING** | **SALDO AWAL** | **PENAMBAHAN** | **PENGURANGAN** | **SALDO AKHIR** |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (17,150,439,647.60) | 0,00 | 0,00 | (17,150,439,647.60) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA REKENING** | **SALDO AWAL** | **PENAMBAHAN** | **PENGURANGAN** | **SALDO AKHIR** |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (3,598,809,035.00) | 0,00 | 0,00 | (3,598,809,035.00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | (739,723,224,850.98) | 0,00 | 0,00 | (739,723,224,850.98) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (0,00) | 0,00 | 0,00 | (0,00) |
| **JUMLAH** | **(760,472,473,533.58)** | **0,00** | **0,00** | **(760,472,473,533.58)** |

## ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset lainnya selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aset Lainnya** | | **Per 31 Des 2021 (Rp)** | **Per 31 Des 2020 (Rp)** |
| a. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) | 0,00 | 0,00 |
| b. | Aset Tidak Berwujud | 3.295.649.150,00 | 2.501.387.450,00 |
|  | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.236.272.219,79) | (594.378.238,54) |
| c. | Aset Lain-lain | 1.796.224.746,00 | 1.796.224.746,00 |
|  | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | (1.118.669.671,00) | (1.118.669.671,00) |
| **Jumlah Aset Lainnya** | | **2.736.932.005,21** | **2.584.564.286,46** |

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 2.736.932.005,21 dan Rp 2.584.564.286,46 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.295.649.150,00 dengan Akumulasi amortisasi sebesar (Rp 1.236.272.219,79), dan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.501.387.450,00 dengan akumulasi amortisasi sebesar (Rp 594.378.238,54). Adapun rincian aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | **NAMA REKENING** | **NILAI PEROLEHAN**  **Per 31 desember**  **2021** | **AKUMULASI AMORTISASI** | **NILAI BUKU**  **Per 31 desember**  **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 |
|  | Hak Cipta .... | 0,00 | (0,00) | 0,00 |
|  | Software | 332.323.450,00 | (90.004.267,71) | 242.319.182,29 |
|  | Kajian | 2.963.325.700,00 | (1.146.267.952,08) | 1.817.057.747,92 |
| **Jumlah** | | **3.295.649.150,00** | **(1.236.272.219,79)** | **2.059.376.930,21** |

## Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain adalah merupakan aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat) yang ada di DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.796.224.746,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp 1.118.669.671,00) dan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.796.224.746,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp 1.118.669.671,00).

## KEWAJIBAN

* + - 1. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

## Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan 31

Desember 2020 sebesar Rp 0,00

## Utang Beban

Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.849.864,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 29.552.919,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

* + - * 1. Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.133.430,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember 2020 (Rp)** |
| **1** | Utang Beban Pegawai (Gaji pokok ASN) | 0,00 | 9.285.840,00 |
| **2** | Utang Beban Pegawai (Tunjangan keluarga ASN) | 0,00 | 371.436,00 |
| **3** | Utang Beban Pegawai (Pembulatan gaji ASN) | 0,00 | 678,00 |
| **4** | Utang Beban Pegawai (Iuran jaminan kesehatan ASN) | 0,00 | 386.304,00 |
| **5** | Utang Beban Pegawai (Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN) | 0,00 | 89.172,00 |
| **Jumlah** | | **0,00** | **10.133.430,00** |

* + - * 1. Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.849.864,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.419.489,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Per 31 Desember**  **2021 (Rp)** | **Per 31 Desember 2020 (Rp)** |
| **1** | Utang Beban Barang dan Jasa (Listrik) | 15.274.644,00 | 13.817.759,00 |
| **2** | Utang Beban Barang dan Jasa (telepon) | 2.909.170,00 | 2.908.180,00 |
| **3** | Utang Beban Barang dan Jasa (air/PAM) | 1.666.050,00 | 2.693.550,00 |
| **Jumlah** | | **19.849.864,00** | **19.419.489,00** |

## Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

## EKUITAS

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan hak (*claim*) terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.014.041.995.530,16 dan

Rp 837.159.119.991,41.

## PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/defisit operasional.

## Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan – LO** | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| **Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO** | 754.394.000,00 | 1.332.551.800,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 754.394.000,00 | 1.332.551.800,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | 0,00 | 0.00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Pendapatan Transfer – LO** | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO** | 0,00 | 0.00 |
| Pendapatan Hibah – LO | 0,00 | 0.00 |
| Dana Darurat – LO | 0,00 | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | **754.394.000,00** | **1.332.551.800,00** |

Saldo masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

## Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 754.394.000,00 dan Rp 1.332.551.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Asli Daerah – LO** | | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 754.394.000,00 | 1.332.551.800,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  dipisahkan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | | **754.394.000,00** | **1.332.551.800,00** |

## V.4.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00

## V.4.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp 754.394.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 1.332.551.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Retribusi Daerah – LO** | | **Tahun 2021**  **(Rp)** | **Tahun 2020**  **(Rp)** |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat –  LO | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 0,00 | 0.00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar – LO | 0,00 | 0.00 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 0,00 | 0.00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO | 0,00 | 0.00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO | 0,00 | 0.00 |
| 9 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO | 0,00 | 0.00 |
| 10 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 754.394.000,00 | 1.332.551.800,00 |
| 11 | Retribusi Terminal – LO | 0,00 | 0.00 |
| 12 | Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO | 0,00 | 0.00 |
| 13 | Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 14 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 15 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga- LO | 0,00 | 0.00 |
| 16 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO | 0,00 | 0.00 |
| 17 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 18 | Retribusi Izin Gangguan – LO | 0,00 | 0.00 |
| 19 | Retribusi Izin Trayek – LO | 0,00 | 0.00 |
| 20 | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja  Asing (IMTA) – LO | 0,00 | 0.00 |
| **Jumlah** | | **754.394.000,00** | **1.332.551.800,00** |

## c) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00

## Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang terdiri atas:

## V.4.a.2)a) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00

## V.4.a.2)b) Pendapatan Lainnya- LO

Pendapatan Lainnya – LO tahun 2021 sebesar Rp 0,00 adalah Pengakuan Pendapatan – LO yang berasal dari pengakuan piutang kerugian Daerah pada tahun 2021.

## V.4.b.Beban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah

Daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  **.** | **Beban** | **Belanja** |
| 1. | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas |
| 2. | Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional  (LO) | Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi  Angaran (LRA) |
| 3. | Menggunakan Kode Akun 9 | Menggunakan Kode Akun 5 |

Beban - LO tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beban** | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| Beban Pegawai – LO | 14.232.787.092,00 | 13.051.952.316,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 22.478.582.300,00 | 13.972.853.469,00 |
| Beban Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 12.792.221.000,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.602.215.020,00 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 436.634.374,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00 | 79.831.498.969,02 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 641.893.981,25 | 549.189.405,21 |
| Beban Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **50.145.484.373,25** | **110.444.343.553,23** |

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.

## Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO pada tahun 2021 sebesar Rp 14.232.787.092,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 13.051.952.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pegawai-LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Beban Gaji Pokok PNS | 6.458.158.380,00 | 6.413.239.940,00 |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 710.182.138,00 | 743.220.794,00 |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 239.020.000,00 | 233.655.000,00 |
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 307.295.000,00 | 286.175.000,00 |
| 5 | Beban Tunjangan Beras PNS | 442.848.300,00 | 379.987.740,00 |
| 6 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 10.828.457,00 | 11.060.730,00 |
| 7 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 93.012,00 | 88.823,00 |
| 8 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 458.323.289,00 | 440.605.536,00 |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 13.165.638,00 | 52.674.273,00 |
| 10 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 39.764.413,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.934.638.475,00 | 1.693.296.645,00 |
| 12 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 249.006.980,00 | 235.367.560,00 |
| 13 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 2.925.123.010,00 | 2.562.580.275,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pegawai-LO** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 14 | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 376.540.000,00 | 0,00 |
| 15 | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 67.800.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **14.232.787.092,00** | **13.051.952.316,00** |

Perbedaan antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai- LRA adalah bahwa pada Beban Pegawai – LO memperhitungkan adanya transaksi – transaksi keuangan yang secara akrual sudah dapat mengurangi ekuitas atau menambah ekuitas tanpa menunggu adanya aliran kas masuk atau keluar sedangkan pada Belanja Pegawai untuk semua transaksi akan dicatat sebagai realisasi manakala ada aliran transaksi keluar.

## Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa pada tahun 2021 sebesar Rp 22.478.582.300,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 13.972.853.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekening** | **Beban Jasa** | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 8.1.2.01.01.0001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 146.675.300,00 | 104.391.700,00 |
| 8.1.2.01.01.0004 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 99.494.000,00 | 205.463.500,00 |
| 8.1.2.01.01.0012 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 5.559.700,00 | 11.286.500,00 |
| 8.1.2.01.01.0014 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 104.545.100,00 | 434.783.208,00 |
| 8.1.2.01.01.0016 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 110.500.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 56.981.450,00 | 42.948.400,00 |
| 8.1.2.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 156.476.850,00 | 141.862.800,00 |
| 8.1.2.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 620.000,00 | 423.000,00 |
| 8.1.2.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7.444.400,00 | 13.447.500,00 |
| 8.1.2.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 144.135.000,00 | 90.965.000,00 |
| 8.1.2.01.01.0054 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 287.639.000,00 | 279.690.500,00 |
| 8.1.2.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 143.400.000,00 | 67.550.000,00 |
| 8.1.2.02.01.0004 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 59.500.000,00 | 677.040.000,00 |
| 8.1.2.02.01.0007 | Beban Honorarium Rohaniwan | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.02.01.0026 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 1.777.800.000,00 | 2.020.700.000,00 |
| 8.1.2.02.01.0031 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 240.500.000,00 | 463.901.000,00 |
| 8.1.2.02.01.0059 | Beban Tagihan Telepon | 34.997.383,00 | 34.005.793,00 |
| 8.1.2.02.01.0060 | Beban Tagihan Air | 24.489.250,00 | 31.828.800,00 |
| 8.1.2.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik | 178.774.489,00 | 186.311.943,00 |
| 8.1.2.02.01.0062 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 30.056.400,00 | 22.410.000,00 |
| 8.1.2.02.01.0067 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 29.176.000,00 | 22.998.400,00 |
| 8.1.2.02.02.0005 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 132.111.328,00 | 113.873.227,00 |
| 8.1.2.02.02.0006 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 6.768.170,00 | 3.936.799,00 |
| 8.1.2.02.02.0007 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 8.460.213,00 | 4.921.001,00 |
| 8.1.2.02.05.0001 | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 3.900.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.02.08.0006 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 91.750.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.02.08.0014 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | 232.595.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.02.09.0011 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei | 79.890.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.02.12.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 29.838.866,00 | 32.445.486,00 |
| 8.1.2.02.02.0002 | Beban Sosialisasi | 107.190.800,00 | 30.510.000,00 |
| 8.1.2.03.02.0003 | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 27.825.000,00 | 175.555.000,00 |
| 8.1.2.03.02.0007 | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment | 21.125.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0035 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat | 176.690.612,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekening** | **Beban Jasa** | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
|  | Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |  |  |
| 8.1.2.03.02.0117 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 13.707.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0120 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 9.605.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0121 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0123 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0245 | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan | 27.590.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0375 | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat | 42.350.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.02.0409 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer | 9.240.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.03.04.0003 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten | 15.803.611.740,00 | 6.642.080.126,00 |
| 8.1.2.03.04.0013 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten | 1.573.788.100,00 | 296.415.770,00 |
| 8.1.2.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 382.780.149,00 | 537.493.516,00 |
| 8.1.2.01.01.0039 | Beban Barang untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga | 0,00 | 1.283.614.500,00 |
|  | **Jumlah** | **22.478.582.300,00** | **13.972.853.469,00** |

## Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2021 sebesar Rp 12.792.221.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Hibah** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Beban Hibah barang kepada pemerintah pusat | 12.792.221.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **12.792.221.000,00** | **0,00** |

## Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 641.893.981,25 dan tahun 2020 sebesar Rp 83.419.537.768,23 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.602.215.020,00 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 436.634.374,00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 0,00 | 79.831.498.969,02 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 641.893.981,25 | 549.189.405,21 |
| **Jumlah** | | **641.893.981,25** | **83.419.537.768,23** |

## Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00

Terdapat selisih antara beban – LO dan belanja LRA sebesar (Rp 10.252.705,00). Penjelasan selisih beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **(Rp)** |
| 1. | Selisih beban pegawai |  |
|  | Selisih penambahan: |  |
|  | * Pengakuan utang insentif tahun 2021 | 0,00 |
|  | Jumlah selisih penambahan beban pegawai | 0,00 |
|  | Selisih pengurangan: |  |
|  | * Pembayaran utang gaji pokok ASN tahun 2020 | (9.285.840,00) |
|  | * Pembayaran utang tunjangan keluarga ASN tahun 2020 | (371.436,00) |
|  | * Pembayaran utang pembulatan gaji ASN tahun 2020 | (678,00) |
|  | * Pembayaran utang iuran jaminan kesehatan ASN tahun 2020 | (386.304,00) |
|  | * Pembayaran utang iuran jaminan kecelakaan kerja ASN tahun 2020 | (89.172,00) |
|  | Jumlah selisih pengurangan beban pegawai | (10.133.430,00) |
|  | **Jumlah Selisih Lebih / ( Kurang ) beban pegawai** | **(10.133.430,00)** |
| 2. | Selisih beban barang dan jasa |  |
|  | Selisih penambahan: |  |
|  | * Pengakuan utang listrik, dll tahun 2021 | 19.849.864,00 |
|  | * Persediaan akhir tahun 2020 | 677.100,00 |
|  | * Penambahan beban dari belanja modal yang tidak masuk aset | 0,00 |
|  | Jumlah selisih penambahan beban barang dan jasa | 20.526.964,00 |
|  | Selisih pengurangan: |  |
|  | * Pembayaran utang listrik dll tahun 2020 | (19.419.489,00) |
|  | * Persediaan akhir tahun 2021 | (1.226.750,00) |
|  | Jumlah selisih pengurangan beban barang dan jasa | (20.646.239,00)) |
|  | **Jumlah Selisih Lebih / ( Kurang ) beban barang dan jasa** | **(119.275,00)** |
| 3. | **Jumlah Selisih Lebih / ( Kurang ) beban pegawai dan barang dan jasa** | **(10.252.705,00)** |

## V.4.c. Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2021 sebesar (Rp 49.391.090.373,25) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp 109.111.791.753,23).

## V.4.d.Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp 0,00. Surplus Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp 0,00 yang merupakan Surplus Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp 0,00 dan Surplus Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp 0,00.

## V.4.e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00 yang merupakan pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 0,00.

## V.4.f. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp 0,00. Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp 0,00 merupakan defisit penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp 0,00 dan defisit penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp 0,00.

## V.4.g. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00 merupakan Pengakuan Beban Non Operasional sebesar Rp 0,00.

## V.4.h.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional pada tahun 2021 sebesar minus Rp 0,00 dan tahun 2020sebesar Rp 0,00.

## V.4.i. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar (Rp 49.391.090.373,25) dan tahun 2020 sebesar (Rp 109.111.791.753,23).

## V.4.j. Pos Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

## PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.014.041.995.530,16 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp 837.159.119.991,41 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2021 sebesar (Rp 49.391.090.373,25) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp 8.073.451.085,00).

## V.5.a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 837.159.119.991,41 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2020.

## V.5.b.Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO tahun 2021 sebesar (Rp 49.391.090.373,25) berasal dari Pendapatan – LO sebesar Rp 754.394.000,00 dikurangi Beban sebesar Rp 50.145.484.373,25 dikurangi Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00 dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

## V.5.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2021 sebesar (Rp 8.073.451.085,00) sedangkan tahun 2020 sebesar (Rp 14.204.095.425,83). Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun 2021 (Rp)** | **Tahun 2020 (Rp)** |
| 1. | Koreksi Nilai Kas | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koreksi Nilai Piutang | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koreksi Nilai Aset Tetap | (8.073.451.085,00) | (Rp 14.204.095.425,83,) |
| 5. | Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Koreksi Nilai Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
|  | **Jumlah** | **(8.073.451.085,00)** | **(Rp 14.204.095.425,83)** |

Koreksi ekuitas lainnya diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar (Rp 8.073.451.085,00) merupakan lebih catat atau kurang catat Aset Tetap per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
       1. Koreksi kurang sebesar Rp 60.000.000,00 adalah koreksi karena adanya Aset Tetap yang sudah dilakukan penghapusan per 31 Desember 2021yaitu Aset Peralatan dan Mesin berupa Mobil Isuzu Panther.
       2. Koreksi kurang aset tetap sebesar minus Rp 8.408.851.700,00.dengan rincian sebagai berikut:
          - Koreksi kurang aset tetap adanya mutasi ke SKPD lain berupa bangunan gedung sebesar minus Rp 8.408.851.700,00.
          - Koreksi kurang aset tetap adanya koreksi harga yang mengurangi aset sebesar minus Rp 0,00.
       3. Koreksi tambah nilai koreksi ekuitas karena adanya terima aset tetap dari SKPD lain sebesar Rp 275.400.615,00 yaitu Aset Peralatan dan Mesin berupa Printer dan Mobil CRV dan koreksi nilai aset tetap dari koreksi kurang catat sebesar Rp 120.000.000,00 yaitu Aset Peralatan dan Mesin berupa Mobil Kijang STD.
    2. Koreksi tambah nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena adanya reklas aset tetap ke aset lain-lain dan penghapusan aset sebesar Rp 0,00.
    3. Koreksi tambah nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 0,00 karena merupakan aset yang berasal dari belanja barang dan jasa tahun 2021 yang belum dicatat.
    4. Koreksi tambah nilai Aset Lain-lain karena adanya koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00.
    5. Koreksi kurang nilai akumulasi penyusutan barang rusak berat karena adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain rusak berat sebesar minus Rp 0,00.
    6. Koreksi kurang atas nilai Kewajiban tahun sebelumnya sebesar minus Rp 0,00. yang merupakan koreksi utang insentif pegawai, internet, pajak, dan utang dana talangan pengadaan pangan tahun sebelumnya.

## BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

## INFORMASI UMUM MENGENAI SKPD

* + 1. Organisasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.

* + 1. Tugas

Tugas pokok DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kabupaten Cilacap tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai fungsi :

* + - 1. perumusan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
      2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan,tata ruang dan jasa konstruksi;
      3. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
      4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
      5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
      6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
      7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
    1. Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, maka Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

* Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3). Bidang Bina Marga, terdiri dari :
* Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
* Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
* Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Jalan dan Jembatan 4). Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
* Seksi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
* Seksi Pengelolaan Bangunan
* Seksi Pengendalian Bangunan 5). Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
* Seksi Perencanaan Tata Ruang
* Seksi Pengendalian Tata Ruang
* Seksi Pemanfaatan Tata Ruang 6). UPTD Perbengkelan

8). UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum 9). UPTD Pemeliharaan Jalan Jeruklegi 10). UPTD Pemeliharaan Jalan Kroya

11). UPTD Pemeliharaan Jalan Sidareja 12). UPTD Pemeliharaan Jalan Majenang

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp 754.394.000,00 atau 36,36 % dari anggarannya sebesar Rp 2.075.000.000,00 atau 56,61 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 1.332.551.800,00.

1. Belanja

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp 235.101.810.997,00 atau 98,79 % dari anggarannya sebesar Rp 237.975.356.925,00 atau 140,61 % dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 167.204.509.848,00.

1. Aset

Aset yang dimiliki DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2021 terdiri dari:

* 1. Persediaan sebesar Rp 1.226.750,00 ( satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  2. Aset tetap sebesar Rp 1.011.323.686.638,95( satu triliun sebelas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh lima rupiah).
  3. Aset lain-lain sebesar Rp 2.736.932.005,21 ( dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima koma dua puluh satu rupiah).

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

1. Pengumpulan data dukung
2. Keterbatasan SDM

Namun demikian berbagai upaya telah kami lakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Cilacap.